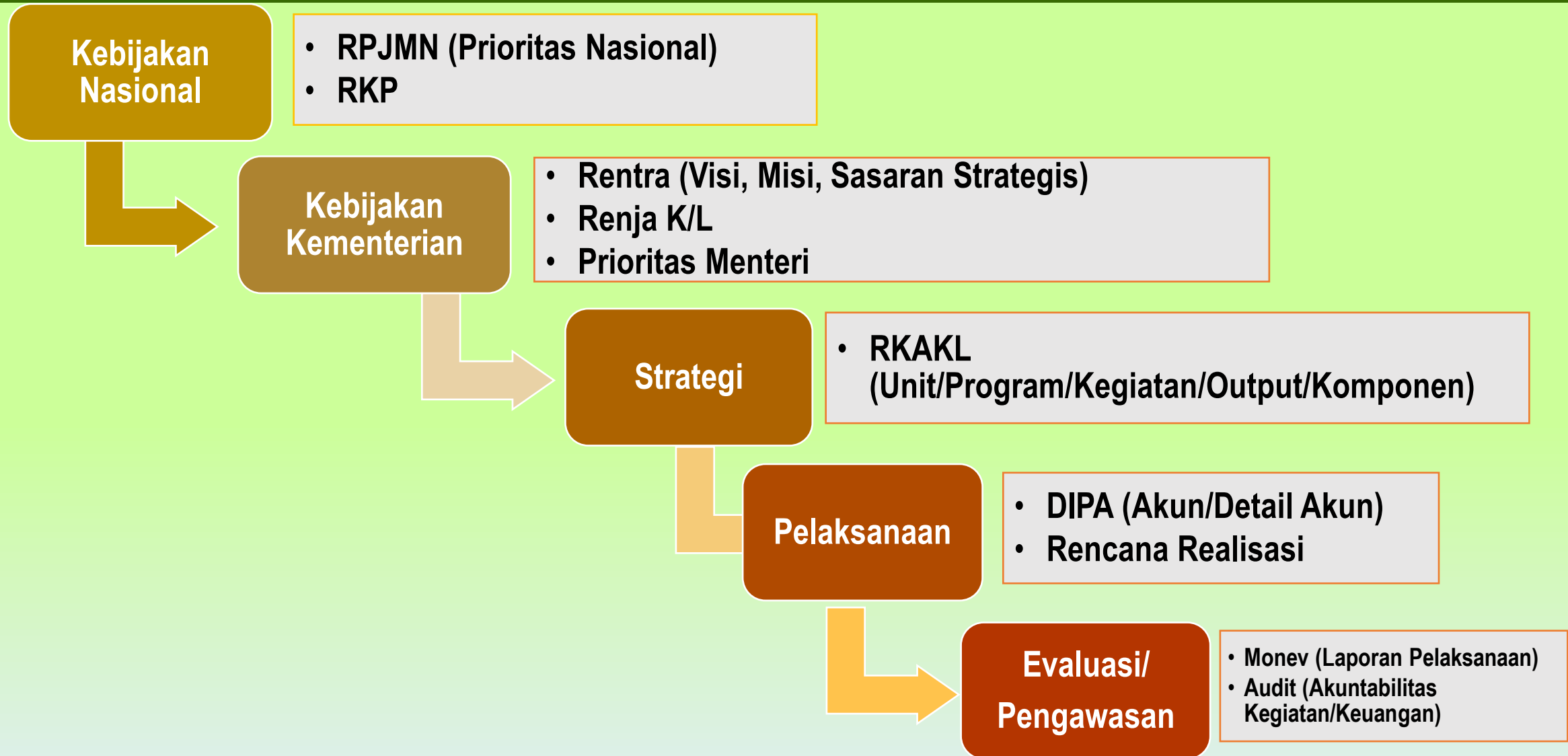


STRATEGI PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

Cirebon, 26 April 2021



ALUR PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN

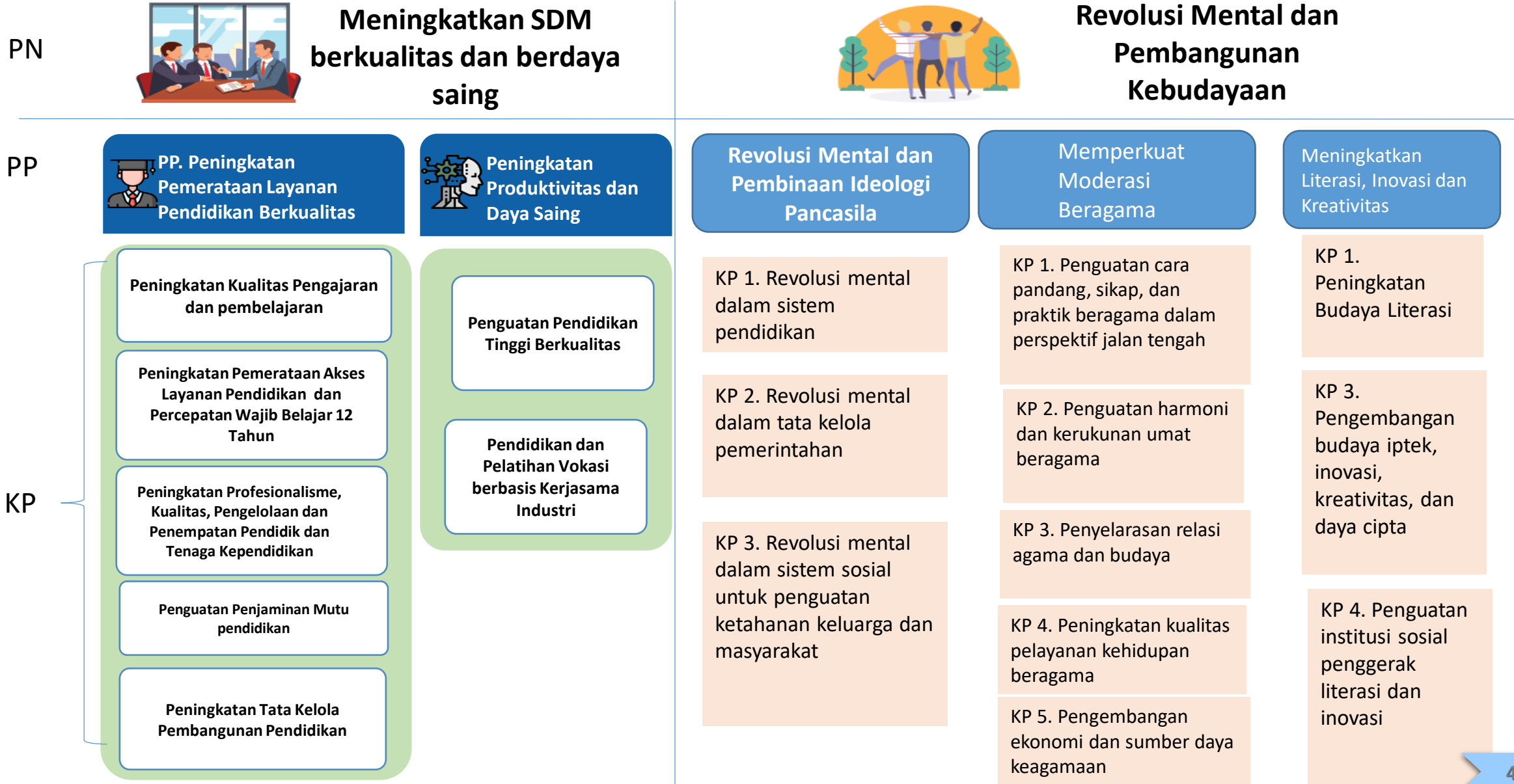




TEMA DAN PRIORITAS RPJMN 2020-2024



ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL YANG MENJADI MANDAT RPJMN KEPADA KEMENTERIAN AGAMA





VISI DAN MISI KEMENTERIAN AGAMA 2020-2024



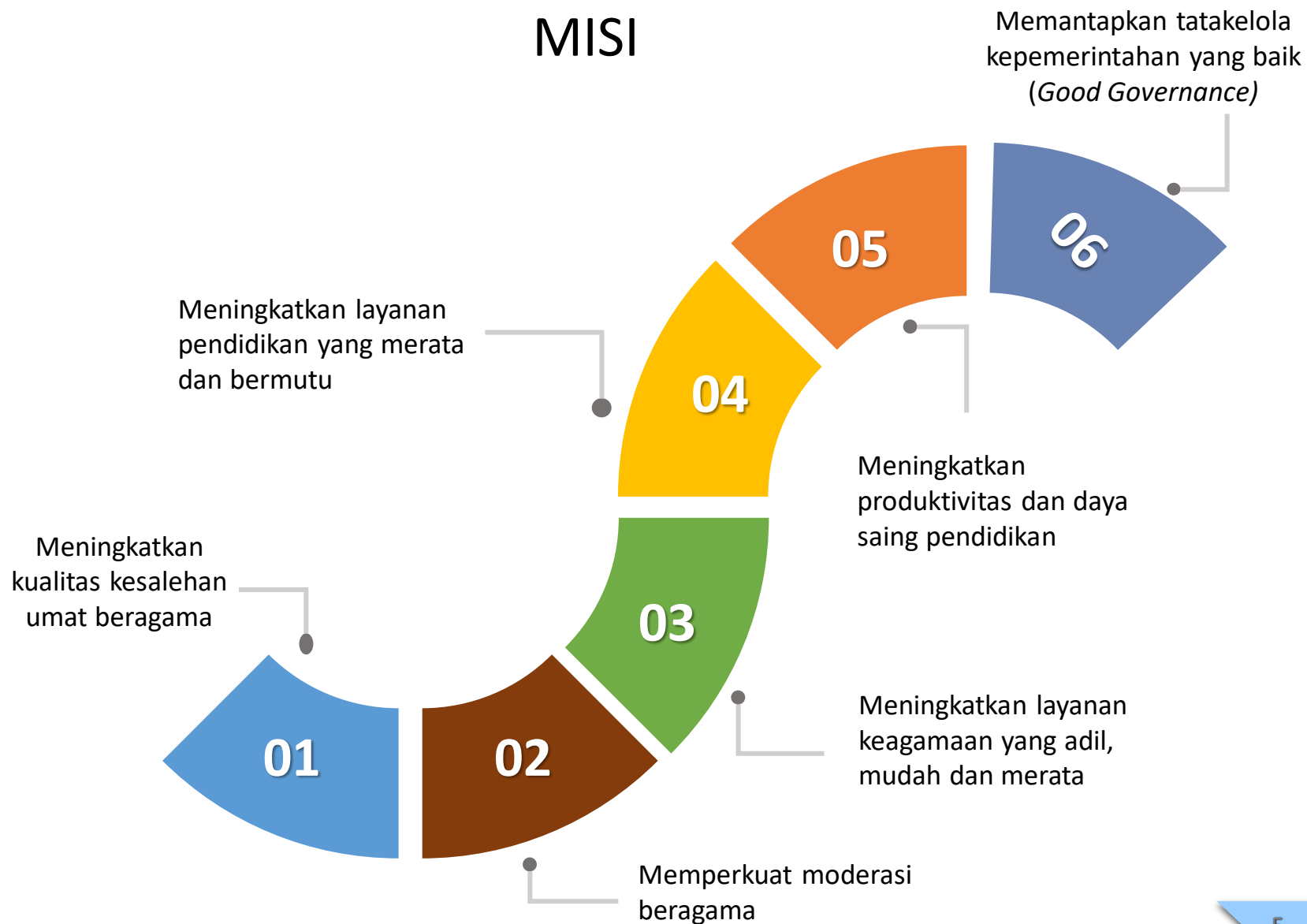
VISI



“Kementerian Agama

yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berdasarkan Gotong Royong”

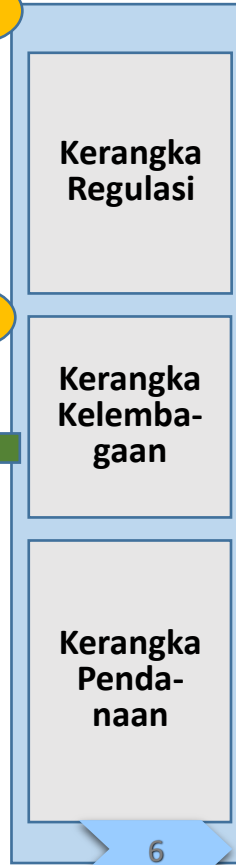
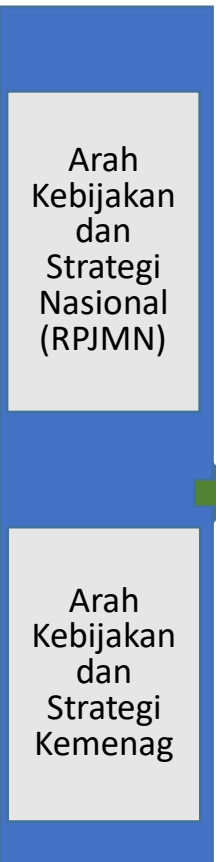
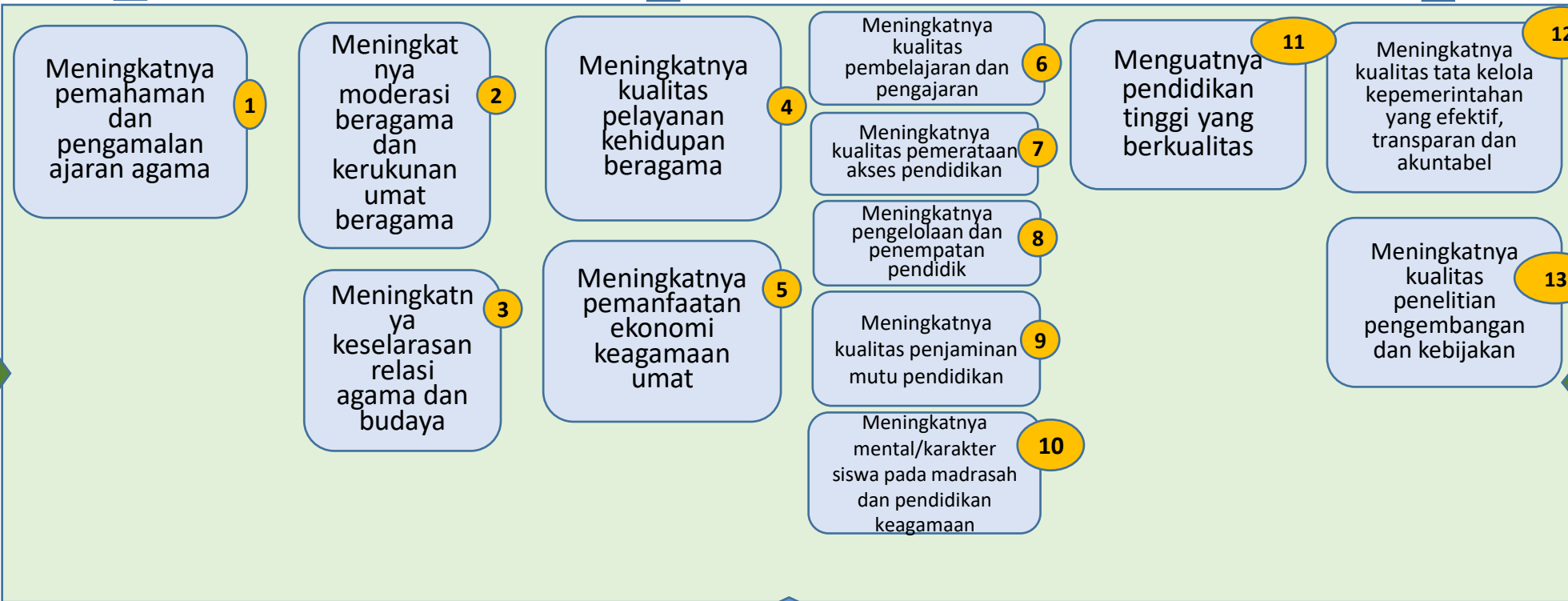
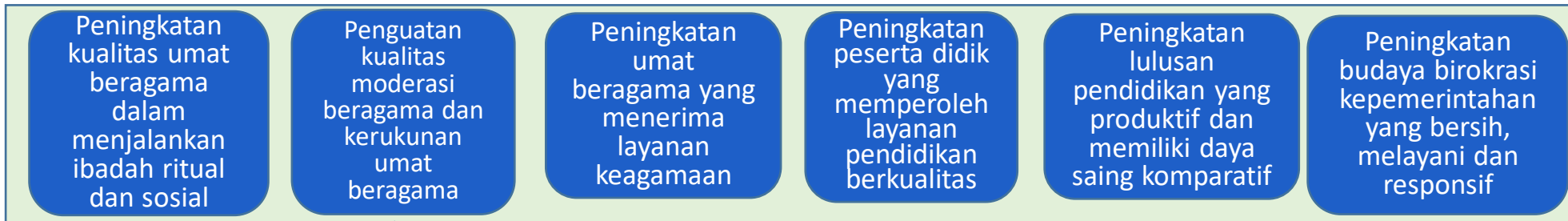
MISI



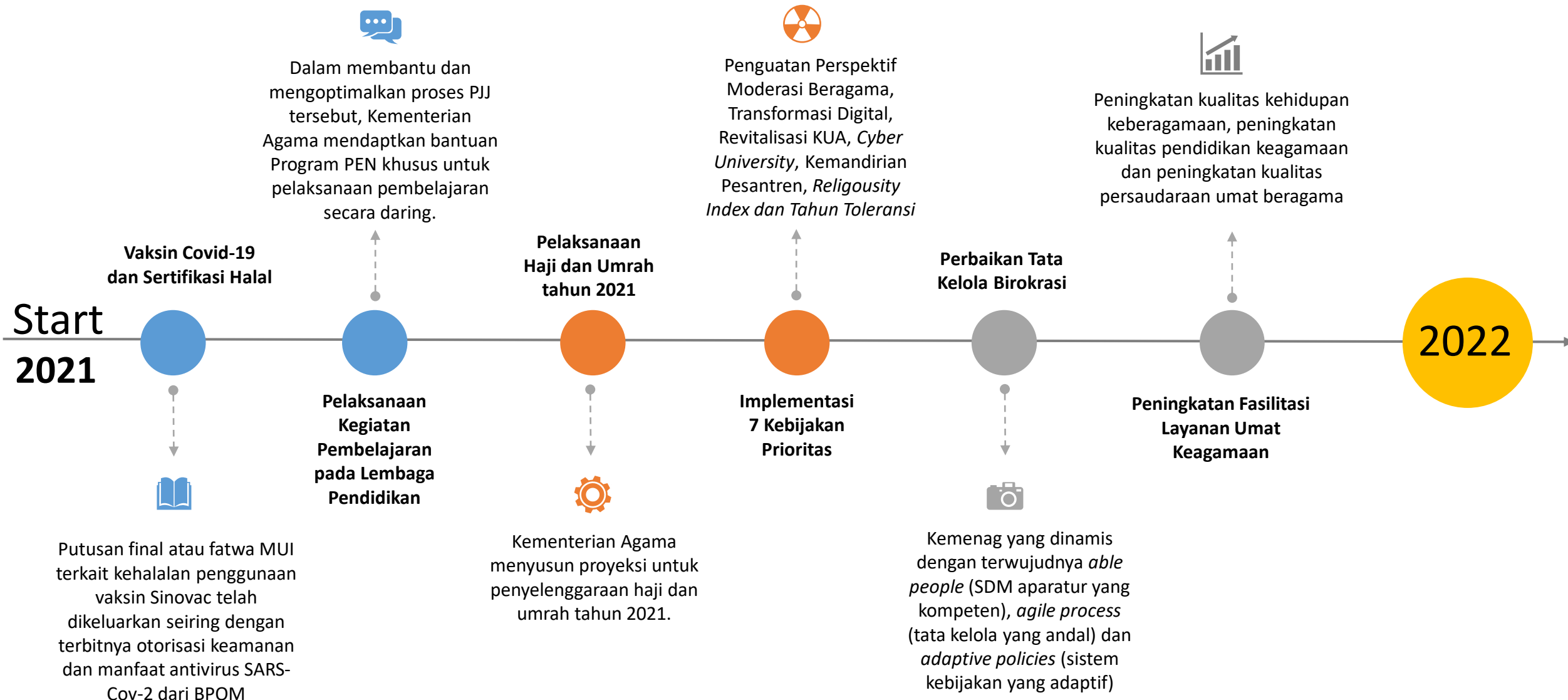


PETA STRATEGIS

Visi & Misi Kemenag



STRATEGI KINERJA 2021



APBN KEMENAG TA 2021



APBN KEMENAG TA 2021

Anggaran Tahun 2021 Berdasarkan Program setelah *Refocusing*

No	PROGRAM	APBN 2021 (Rp000)				
		Sebelum	Penghematan (Refocusing)	Penyesuaian		Menjadi
				BLU	SBSN	
1	Dukungan Manajemen	35.650.754.572	- 132.356.123	-	-	35.518.398.449
2	Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	3.207.891.531	- 351.185.841	-	123.113.648	2.979.819.338
3	Pendidikan Tinggi	6.987.656.465	-	76.550.283	-	7.064.206.748
4	Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	7.060.717.073	-	-	-	7.060.717.073
5	Pendidikan Usia Dini dan Wajib Belajar 12 Tahun	14.054.367.181	-	-	89.052.339	14.143.419.520
	TOTAL ANGGARAN	6.961.386.822	483.541.964	76.550.283	212.165.987	66.766.561.128

APBN KEMENAG TA 2021

Anggaran Tahun 2021 Berdasarkan Sumber Dana

RM dimanfaatkan untuk biaya operasional gaji dan perkantoran, kegiatan prioritas Nasional dan prioritas Kementerian lainnya

SBSN dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas layanan Asrama Haji, Balai Nikah, PTKN, Madrasah, pusat layanan haji kab/kota, dan Laboratorium BPJPH

Anggaran **PNBP** berasal dari peristiwa nikah di KUA, Asrama Haji, Lajnah, Sertifikasi Halal dan penyelenggaraan pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

Pinjaman Luar Negeri dimanfaatkan bagi peningkatan kualitas pendidikan di Madrasah dan PTKN.

Anggaran **BLU** berasal dari Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN) BLU.

NO	SUMBER DANA	APBN 2021 (Rp)	Bobot (%)
1	Rupiah Murni	58.675.183.639.000	87,88
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.740.884.041.000	2,61
3	Badan Layanan Umum	2.098.059.063.000	3,14
4	Pinjaman Luar Negeri	660.366.917.000	0,99
5	Surat Berharga Syariah Negara	3.573.616.995.000	5,35
6	Rupiah Murni Pendamping	18.436.000.000	0,03
JUMLAH		66.766.561.128.000	100,00

APBN KEMENAG TA 2021

Anggaran Tahun 2021 pada Unit Eselon I Berdasarkan Fungsi

Fungsi Pendidikan dimanfaatkan untuk peningkatan akses, mutu dan relevansi pendidikan pada pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan keagamaan dan pendidikan agama di satuan pendidikan umum

Fungsi Agama dimanfaatkan untuk: peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama; peningkatan kerukunan umat beragama, peningkatan layanan kehidupan beragama, peningkatan tata kelola potensi ekonomi berbasis keagamaan, peningkatan layanan haji dan umrah, dan peningkatan layanan jaminan produk halal

NO	UNIT ESELON I	APBN 2021 (Rp000)		
		Agama	Pendidikan	Jumlah
1	Sekretariat Jenderal	2.221.016.963	4.915.825	2.225.932.788
2	Inspektorat Jenderal	100.412.495	59.355.132	159.767.627
3	Ditjen Bimas Islam	5.666.222.204	-	5.666.222.204
4	Ditjen Pendidikan Islam	-	52.689.597.988	52.689.597.988
5	Ditjen Bimas Kristen	258.512.100	1.584.407.084	1.842.919.184
6	Ditjen Bimas Katolik	203.691.174	683.109.114	886.800.288
7	Ditjen Bimas Hindu	139.589.026	641.911.763	781.500.789
8	Ditjen Bimas Buddha	65.266.291	195.384.109	260.650.400
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji & Umrah	1.540.974.214	-	1.540.974.214
10	Badan Litbang dan Diklat	435.575.403	192.390.404	627.965.807
11	Badan Penyelenggara JPH	84.229.839	-	84.229.839
JUMLAH		10.715.489.709	56.051.071.419	66.766.561.128

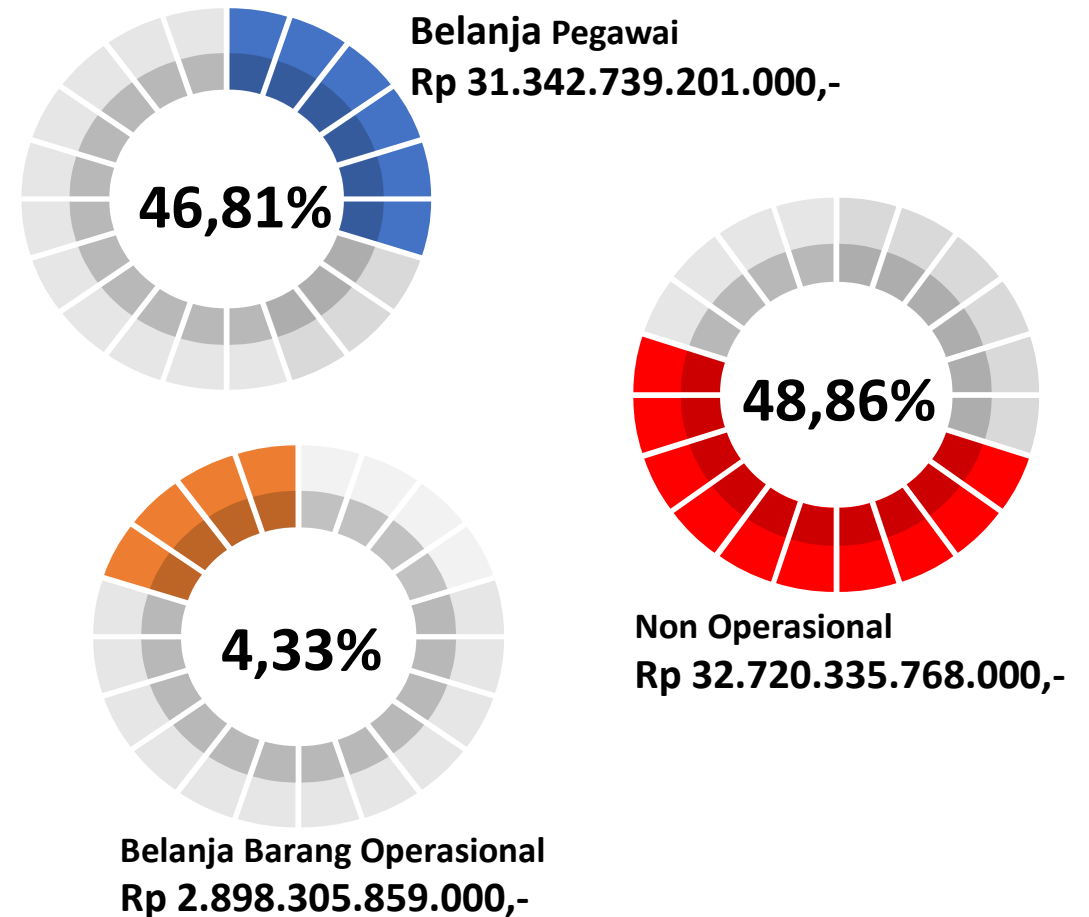
ANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA BERDASARKAN JENIS PENGELUARAN

Belanja pegawai operasional yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada hak PNS Kementerian Agama, termasuk di dalamnya adalah tunjangan profesi guru dan dosen PNS

Belanja barang operasional yang meliputi pembiayaan operasional kantor, pemeliharaan gedung, pemeliharaan kendaraan operasional, rapat-rapat, langganan daya dan jasa, serta berbagai kegiatan operasional lainnya

Belanja non operasional yang meliputi seluruh pengeluaran pembiayaan kegiatan di luar *belanja* pegawai dan belanja barang operasional. Termasuk di dalam pengeluaran non operasional ini adalah pengeluaran untuk pembiayaan kegiatan prioritas nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama.

Berdasarkan Jenis Belanja



Catatan Pelaksanaan Anggaran 2021

1. Pelajari dan telaah kembali DIPA, jika dipandang perlu segera lakukan revisi agar focus pada pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
2. Lakukan pengecekan satu per satu detil program, kegiatan dan anggaran, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang menghamburkan, mana yang memboroskan untuk dihilangkan, pastikan bahwa anggaran tersebut memang bermanfaat;
3. Laksanakan optimalisasi pelaksanaan anggaran antara lain dengan efisiensi pada belanja yang tidak berdampak langsung bagi peningkatan kinerja Kementerian Agama;
4. Perhatikan dan fokus pada kegiatan prioritas sesuai dengan Prioritas Nasional dan Prioritas Menteri Agama melalui optimalisasi pemanfaatan anggaran terutama yang memiliki nilai tambah yang besar dan dampak langsung pada masyarakat;
5. Segera selesaikan jika masih terdapat catatan dalam DIPA untuk memastikan program dan kegiatan dapat segera dilaksanakan mulai bulan Januari 2021, khususnya yang masih diblokir Kemenkeu akibat belum lengkapnya data pendukung dan belum terbitnya reuiu APIP;
6. Tingkatkan koordinasi dan konsultasi baik secara internal maupun dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

Catatan Pelaksanaan Anggaran 2021

7. Selesaikan seluruh temuan hasil pemeriksaan BPK-RI, BPKP, dan Inspektorat Jenderal sesuai dengan rekomendasi dan hindari kesalahan yang sama agar tidak berulang pada tahun 2021.
8. Melakukan Percepatan Proses Pengadaan BarangJasa, meliputi: Penetapan pejabat pengadaan, unit kerja pengadaan barang/jasa, dan/atau kelompok kerja pengadaan; Penandatanganan kontrak; Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK); Pendaftaran kontrak ke KPPN.
9. Mengantisipasi dan Menyelesaikan Pagu Minus, meliputi: pemutakhiran data RKA-KL /DIPA dan POK secara berkala; tidak melakukan revisi yang berakibat pada pengurangan alokasi terhadap pagu yang sudah dikontrakkan; memastikan bahwa dalam pengajuan pencairan anggaran, pagu DIPA telah cukup/tersedia sampai dengan level akun; segera melakukan revisi anggaran apabila terjadi pagu minus atau potensi terjadinya pagu minus.
10. Meningkatkan Akurasi Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan Realisasi Pembayaran.
11. Pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana tersebut diatas tetap memperhatikan dan menjaga transparansi dan akuntabilitas.

@kemenag2021